

BAB V

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis penelitian mengenai *austerity* (dengan indikator penerimaan pajak dan belanja negara) dan pertumbuhan ekonomi (dengan indikator produk domestik bruto) di Indonesia Tahun 2010.1-2017.2, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis jangka panjang dalam model ARDL dan menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerimaan pajak (instrumen *austerity*) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, dalam analisis jangka pendek model ARDL dan menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerimaan pajak (instrumen *austerity*) juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun dalam persamaan jangka pendek, penerimaan pajak bersifat positif kemudian bersifat negatif dalam jangka panjang.
2. Berdasarkan analisis jangka panjang dalam model ARDL dan menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja negara (instrumen *austerity*) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian, dalam analisis jangka pendek model ARDL dan

menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja negara (instrumen *austerity*) juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun pengaruh belanja negara dalam jangka pendek bersifat negatif, namun dalam jangka panjang bersifat positif.

3. Berdasarkan analisis jangka panjang dan jangka pendek dalam model ARDL dan menggunakan uji F dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dan belanja negara secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu:

1. Langkah penerimaan pajak sebagai instrumen *austerity* di Indonesia memiliki dampak yang negatif. Hal ini sesuai dengan pandangan “*anti-tax*” bahwa peningkatan penerimaan pajak akan menyebabkan fase *recovery* perekonomian melambat, bahkan penerimaan pajak itu sendiri lebih melambat. Penelitian yang dilakukan Alesina dkk (2014), Guardo dkk (2011), Wachtmeister dkk (2015), dan Fragetta & Roberto (2017) juga menyetakan hasil yang negatif pada langkah *austerity* berbasis pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, di Indonesia, peningkatan penerimaan pajak sebagai langkah *austerity* baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak berujung pada sebuah hasil berarti. Hal itu lantaran

upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan *austerity* berbasis penerimaan pajak tidak banyak dilakukan. *Tax amnesty* sebagai upaya penambahan penerimaan pajak, hanya diterapkan triwulan II 2016 - triwulan II 2017. Peningkatan penerimaan pajaknya pun tidak begitu signifikan, hanya 4,88% (*q-to-q*) yang mana nilainya di bawah rerata pertumbuhan penerimaan pajak riil selama 2010-2017, yakni 8,38%. Hal ini menandakan langkah *tax amnesty* tidaklah berhasil sebab masih banyak uang warga negara Indonesia yang tidak terserap pajak dalam negeri.

2. Langkah belanja negara sebagai instrumen *austerity* di Indonesia memiliki dampak yang berarti baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian yang dilakukan Born dkk (2014), Guardo dkk (2011), Alesina dkk (2018), Wachtmeister dkk (2015), Fragetta & Roberto (2017) menyajikan hasil bahwa langkah *austerity* berbasis belanja negara juga akan berdampak yang menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ekonom *anti-austerity*, Blyth (2013) yang merupakan ekonom Neo-Keynesian menjelaskan bahwa belanja negara yang dikurangi akan merusak perekonomian dalam jangka panjang. Belanja negara signifikan negatif pada jangka pendek menandakan bahwa utang yang harus dibayar pemerintah untuk mengurangi gap defisit anggaran masih besar. Namun, dalam jangka panjang, karena utang tersebut kian berkurang, maka diperiode selanjutnya usai kuartal 1 ($lag=1$), pemotongan belanja negara

berdampak positif karena utang kian mengecil, defisit mengecil, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Kombinasi langkah *austerity* dilakukan bersama-sama pada tahun 2016 dan 2017, kombinasi penerimaan pajak dan belanja negara memiliki makna yang berarti bagi perekonomian. Namun, pengaruhnya dalam jangka pendek dan panjang tidak menguntungkan bagi perekonomian, seperti yang diungkapkan Keynes (Skidelsky dan Fraccaroli, 2017, p. 173) bahwa langkah *austerity* tidak tepat untuk dilaksanakan dan diterapkan saat perekonomian merosot dan baiknya dilakukan saat fase *boom*.

C. Saran

Berdasarkan pernyataan dalam implikasi di atas, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Langkah *austerity* berbasis penerimaan pajak memberikan dampak tidak signifikan. Oleh karena itu, untuk memperkecil defisit dengan meningkatkan pendapatan negara melalui fokus pada sektor-sektor produktif. Dengan adanya program ekonomi berupa pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat mengoptimalkan jalur distribusi itu dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri sehingga proses produksi dan distribusi dapat teroptimalkan yang mana baik untuk sektor-sektor perekonomian lainnya.

2. Langkah *austerity* berbasis belanja negara memberikan dampak positif dalam jangka panjang walaupun negatif dalam jangka pendek. Sebab adanya subsidi, baik BBM maupun listrik, akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mana tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, untuk produk-produk BUMN yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat luas, subsidi tidak baik dilakukan.
3. Kombinasi penerimaan pajak dan belanja negara sudah terbukti melemahkan perekonomian di saat ekonomi melemah. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan kombinasi langkah *austerity* saat perekonomian sedang berada di puncak dan tidak di saat perekonomian melemah atau bahkan krisis.